

Ketidakterdayaan Struktural dan Ketahanan Komunitas Nelayan Tradisional

Structural Disempowerment and the Resilience of Traditional Fishing Communities

*Rahmaniar Maulani dan Nuke Martiarini

Universitas Negeri Semarang
Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 15 Desember 2025
Perbaikan naskah: 26 Februari 2026
Disetujui terbit : 5 April 2026

Korespondensi penulis:
Email: rahmaniarmaulani@students.unnes.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v12i1.19184>



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi nelayan tradisional yang mengalami marginalisasi ekonomi, sosial, dan hukum sehingga menimbulkan ketidakterdayaan struktural yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif interpretatif dengan melibatkan empat partisipan utama nelayan Kota Semarang melalui *Focus Group Discussion* (FGD), serta dua partisipan pendukung yang merupakan ketua KNTI dan KPPI Kota Semarang, kemudian diikuti dengan *go-along interview*, observasi partisipatif, dan *photo-elicitation* untuk memahami bentuk-bentuk ketidakterdayaan nelayan tradisional dan strategi untuk bertahan secara kolektif. Penelitian dilaksanakan di kawasan pesisir Kota Semarang pada bulan Agustus-September 2025. Data dianalisis menggunakan analisis *Reflexive Thematic Analysis* (RTA). Hasil menunjukkan tiga dinamika utama, yaitu: (1) gambaran umum sosial ekonomi nelayan tradisional yang mendorong nelayan berutang sebagai mekanisme bertahan hidup; (2) ketidakterdayaan yang muncul dari dependensi pada musim, alat tangkap, relasi kerja yang tidak setara, minimnya pilihan pekerjaan, struktur pasar yang tidak berpihak, lemahnya legalitas kepemilikan kapal, dan birokrasi yang berbelit-belit. (3) Munculnya ketahanan komunitas (*community resilience*) sebagai upaya mengurangi ketidakterdayaan pada masyarakat pesisir melalui peran gender yang saling melengkapi di mana laki-laki memaknai melaut sebagai tanggung jawab, sementara perempuan menopang ekonomi keluarga melalui penjualan dan pengolahan hasil laut, jaringan sosial masyarakat pesisir berupa gotong royong, dan dukungan organisasi non-pemerintah sebagai modal sosial dalam perlindungan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidakterdayaan nelayan bukan hanya persoalan individual melainkan hasil ketimpangan struktural yang dapat diperkecil melalui penguatan nilai kolektif. Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan dan pelembagaan kelompok gotong royong nelayan berbasis komunitas.

Kata Kunci: marginalisasi; ketidakterdayaan; ketahanan komunitas; nelayan tradisional; ketimpangan struktural

ABSTRACT

This study investigates the structural powerlessness experienced by traditional fishers as a consequence of economic, social, and legal marginalisation. Employing a qualitative interpretive approach, the research engaged four primary participants—traditional fishers in Semarang City—through focus group discussions (FGDs), complemented by two key informants representing the Indonesian Traditional Fisherfolk Union (KNTI) and the Indonesian Fishers Association (KPPI). Data collection involved FGDs, in-depth interviews, participant observation, and photo-elicitation to capture both lived experiences and collective survival strategies. The study was conducted in the coastal areas of Semarang between August and September 2025 and analysed using Reflexive Thematic Analysis (RTA). The findings reveal three interrelated dynamics: (1) precarious socio-economic conditions that drive chronic indebtedness as a coping mechanism; (2) structural constraints, including dependence on seasonal fishing, unequal labour relations, limited livelihood diversification, unfavourable market systems, insecure asset ownership, and bureaucratic complexity; and (3) emergent community resilience, reflected in gendered livelihood roles, mutual aid practices (gotong royong), and support from civil society organisations. Overall, the study demonstrates that fisher powerlessness is rooted in structural inequalities rather than individual limitations, underscoring the need to strengthen institutional support for community-based systems.

Keywords: marginalisation; structural disempowerment; community resilience; traditional fishers; structural inequality

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Marginalisasi adalah proses kompleks yang menggambarkan ketimpangan sosial pada kelompok yang terpinggirkan sehingga membatasi peluang untuk berkembang (Causadias & Umaña-Taylor, 2018; Richards, 2023). Kelompok marjinal ini terbentuk karena perbedaan struktur sosial yang selanjutnya memunculkan perlakuan diskriminatif

serta pengabaian terhadapnya (Faradillah *et al.*, 2024). Ketimpangan ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari akses pendidikan, ekonomi, sosial, hingga politik (Bambra, 2022; Mezzina *et al.*, 2022; Pahux, 2023). Akibatnya, ruang gerak mereka terbatas, daya tawar yang rendah, serta kesulitan dalam mempertahankan atau memperjuangkan posisi mereka, termasuk dalam mengakses sektor

ketenagakerjaan (Ghosh & Das, 2021; Ilham *et al.*, 2019; Varghese & Kumar, 2022). Kondisi ini diperkuat dengan adanya jarak sosial (*social distance*), yakni minimnya akses kelompok marginal terhadap jaringan dan modal sosial yang dimiliki kelompok mayoritas, sehingga berujung pada minimnya pengakuan, dukungan, dan kesempatan yang tersedia bagi mereka (Gustavsson & Riley, 2018; Savonen *et al.*, 2022).

Individu yang dikategorikan sebagai kelompok marjinal mencakup orang miskin, anak jalanan, gelandangan, pengemis, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat dan kelompok tradisional yang saat ini menjadi minoritas (Pahux, 2023). Salah satu kelompok yang kerap termarginalkan yang ditandai dengan tingginya kemiskinan dan minimnya aksesibilitas fasilitas kesehatan dan pendidikan adalah komunitas nelayan tradisional (Halim *et al.*, 2018). Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki potensi sumber daya laut yang besar, seperti ikan, rumput laut, udang, dan hasil laut lainnya (Anwar *et al.*, 2019; Tarigan & Ferdinanto, 2024). Namun ironisnya, potensi besar ini belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan sosial nelayan (Anwar *et al.*, 2019). Nelayan tradisional hidup dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan, karena terbatasnya akses terhadap modal, pasar, dukungan sosial, dan pengakuan hukum, yang menyebabkan mereka sulit meningkatkan produktivitas, memperoleh perlindungan hukum yang memadai, serta rentan secara ekonomi (Anwar *et al.*, 2019; Halim *et al.*, 2018; Tarigan & Ferdinanto, 2024). Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kekayaan laut yang melimpah dengan kemiskinan nelayan.

Secara ekonomi, nelayan tradisional hidup dalam kemiskinan yang bersifat struktural (*structural poverty*), yakni miskin yang terjadi bukan semata akibat kekurangan atau kesalahan individu, melainkan lebih karena peluang, sumber daya, serta sistem yang menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan sehingga mereka sulit keluar dari kemiskinan (Calnitsky, 2018; Pinem *et al.*, 2019). Ketergantungan nelayan pada sumber daya laut, musim, cuaca, dan harga ikan yang tidak stabil yang membuat penghasilan mereka cenderung rendah dan tidak menentu (Tarigan & Ferdinanto, 2024). Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan kepemilikan aset yang berdampak pada terbatasnya akses pinjaman formal, sehingga nelayan sering bergantung pada rentenir ataupun tengkulak yang menerapkan bunga tinggi ataupun memaksa membeli hasil laut dengan harga rendah

(Fitriyani *et al.*, 2021). Kondisi tersebut tergambar melalui pernyataan Suntiiah (55 tahun), Ketua Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), yang mengungkapkan bahwa sulitnya nelayan mengakses pinjaman formal berupa bank ataupun tempat peminjaman modal yang resmi mendorong mereka mengambil pinjaman pada rentenir dan tengkulak sebagai alternatif jalan keluar yang cepat dan mudah, meskipun disertai dengan risiko bunga yang tinggi dan memperdalam kerentanan ekonomi nelayan (wawancara, 21 April 2025).

Marginalisasi nelayan juga terjadi pada ranah sosial dan hukum. Nelayan umumnya memiliki jaringan sosial yang sempit serta minim pengakuan sehingga sulit menjangkau berbagai sumber daya dan kesempatan yang lebih luas (Gustavsson & Riley, 2018). Mereka juga berada dalam posisi rentan akibat ketimpangan pengelolaan sumber daya serta kebijakan perikanan yang lebih berpihak kepada industri perikanan berskala besar (Halim *et al.*, 2018). Minimnya literasi hukum membuat nelayan tidak memahami hak-hak mereka, seperti perizinan, legalitas kapal, ataupun alat pemantau kapal sehingga aktivitas mereka tidak terpantau secara layak dan berpotensi menimbulkan kerentanan, menghambat akses bantuan pemerintah, dan memperburuk kesejahteraan sosial ekonomi mereka (Hikmah & Nasution, 2018). Kondisi tersebut ditegaskan oleh Ari (39 tahun), Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Semarang, yang mengungkapkan bahwa hak-hak nelayan tradisional sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemberdayaan dan perlindungan nelayan belum sepenuhnya terpenuhi pemerintah, sehingga nelayan masih berada dalam kondisi minim perlindungan. Selain itu, tingkat pendidikan nelayan tradisional yang relatif rendah turut berkontribusi pada rendahnya literasi hukum, sehingga nelayan belum sepenuhnya memahami hak-hak yang seharusnya mereka peroleh (wawancara, 18 April 2025).

Marginalisasi yang berlangsung secara berulang tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, dan hukum, tetapi juga memunculkan rasa ketidakadilan subjektif ketika dibandingkan dengan kelompok atau individu lain (Sofian, 2023; Suryawan, 2015). Situasi tersebut memicu munculnya perasaan ketidakpuasan atau kesenjangan yang dikenal dengan istilah deprivasi relatif (*relative deprivation*) (Mo, 2018). Teori deprivasi relatif menjelaskan bahwa perasaan kekurangan atau ketidakpuasan seseorang tidak hanya dipicu oleh kondisi objektif, tetapi juga oleh perbandingan sosial terhadap individu atau kelompok lain yang dinilai lebih beruntung

(Runciman, 1972). Hal ini menimbulkan perasaan tertinggal, frustrasi, hingga munculnya perilaku kriminal dan berisiko (Feng *et al.*, 2024; Mo, 2018). Meskipun demikian, marginalisasi dan deprivasi relatif tidak selalu berujung pada kemunduran sosial suatu komunitas (Chen *et al.*, 2022; Yunus *et al.*, 2024). Berbagai tekanan yang dirasakan seperti keterbatasan ekonomi, sempitnya jaringan sosial, serta kebijakan yang tidak berpihak seringkali memunculkan strategi adaptasi berupa ketahanan sosial, kearifan lokal, dan solidaritas sosial yang kuat dalam komunitas nelayan (Chen, 2015; Yunus *et al.*, 2024). Keterbatasan ini juga mendorong individu dan kelompok untuk membentuk harapan yang lebih tinggi terhadap masa depan maupun motivasi untuk melawan atau memperbaiki keadaan yang dirasa tidak adil (Chen *et al.*, 2022; Chen, 2015).

Beberapa studi menunjukkan bahwa masyarakat pesisir memiliki potensi ketahanan berupa relasi gender, solidaritas sosial yang berupa budaya kerja sama, serta jaringan sosial informal, yang memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi kerentanan ekologi dan ekonomi (Isrofi & Gunawan, 2025; Triana & Hidayah, 2020). Dalam konteks ini, relasi gender yang saling melengkapi dimana laki-laki sebagai kepala rumah tangga berperan sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai penopang ekonomi keluarga melalui penjualan serta pengolahan hasil laut, dapat memperkuat stabilitas ekonomi keluarga di tengah ketidakpastian pendapatan nelayan (Istiqomah, 2018; Wulandari *et al.*, 2022). Selain itu, praktik saling membantu antar nelayan serta dukungan kolektif organisasi lokal seperti KNTI turut berfungsi sebagai pemberi perlindungan kolektif ketika terjadi bencana maupun ketika sistem pasar atau regulasi tidak berpihak pada mereka (Isrofi & Gunawan, 2025; Nance *et al.*, 2024). Ketahanan-ketahanan tersebut mampu mereduksi dampak buruk deprivasi relatif, sebab solidaritas komunitas serta peran gender memberikan ruang bagi masyarakat pesisir untuk tetap berdaya secara kolektif, meskipun berada dalam relasi kekuasaan yang tidak seimbang (Istiqomah, 2018; Wu *et al.*, 2024; Wulandari *et al.*, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir tidak sepenuhnya pasif terhadap ketidakadilan yang dialami, melainkan memiliki kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, serta mempertahankan fungsi sosial mereka di tengah keterbatasan, yang dalam literatur disebut sebagai *community resilience* (Norris *et al.*, 2008).

Dengan demikian, ketahanan masyarakat pesisir tidak dapat dipisahkan dari interaksi

antara relasi gender, solidaritas sosial, serta peran organisasi dalam memperjuangkan hak-hak nelayan. Oleh karena itu, memahami ketahanan masyarakat pesisir tidak hanya menuntut kajian mengenai faktor risiko yang menekan mereka, tetapi juga bagaimana komunitas membentuk strategi bertahan melalui modal sosial, kolaborasi gender, dan gerakan kolektif yang terorganisasi. Meskipun berbagai studi telah mengkaji kemiskinan dan marginalisasi nelayan tradisional Indonesia, sebagian besar penelitian masih menempatkan nelayan sebagai kelompok rentan yang pasif dengan fokus utama pada kerentanan ekonomi dan kebijakan yang kurang berpihak. Masih terbatasnya kajian secara eksplisit yang menganalisis bagaimana nelayan dan komunitas pesisir membangun ketahanan sosial melalui relasi gender, solidaritas komunitas, dan dukungan organisasi lokal sebagai mekanisme terhadap deprivasi relatif dan ketimpangan struktural. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana ketidakberdayaan nelayan tradisional terbentuk sebagai dampak dari ketimpangan struktural dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum, sekaligus menganalisis peran relasi gender yang saling melengkapi, solidaritas sosial, serta dukungan organisasi lokal sebagai strategi kolektif yang membentuk ketahanan komunitas (*community resilience*) di lingkungan pesisir.

PENDEKATAN ILMIAH

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif untuk menggali pengalaman hidup, ketidakberdayaan, dan ketahanan komunitas pada nelayan tradisional sebagai kelompok marjinal pesisir. Pendekatan ini dipilih sebagai upaya memahami secara mendalam terkait pengalaman yang dikonstruksi oleh individu dan komunitas dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya mereka (Bush *et al.*, 2019; Popov *et al.*, 2023). Penelitian dilaksanakan di kawasan pesisir di Kota Semarang pada Agustus–September 2025. Lokasi ini dipilih secara purposif dengan pertimbangan kawasan permukiman informal nelayan tradisional yang memiliki kerentanan sosial-ekologis terkait perubahan iklim, keterbatasan akses ekonomi, serta ketidakpastian sumber penghidupan. Partisipan utama penelitian adalah empat nelayan tradisional, dan satu partisipan dipilih sebagai informan kunci untuk pendalaman fenomenologis berdasarkan tingkat keterlibatan komunitas serta relevansi pengalaman dengan fokus penelitian, selain itu terdapat dua partisipan pendukung yang merupakan ketua KNTI dan KPPI Kota Semarang.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, diawali dengan wawancara, lalu *focus group discussion* (FGD), kemudian diikuti dengan *in-depth interviews* dengan menggunakan variasi *go-along interviews*, observasi, dan teknik visual (*photo-elicitation*). Wawancara berfungsi sebagai tahap awal mengetahui gambaran marginalisasi nelayan tradisional. FGD dilakukan untuk mengidentifikasi tema umum terkait kehidupan keluarga, dinamika komunitas, kerentanan, dan ketahanan. Selanjutnya, *go-along interviews* dilakukan dengan mengikuti partisipan dalam aktivitas melaut dan kegiatan harian untuk menangkap pengalaman dan makna dalam konteks nyata (Kusenbach, 2003; Stiegler, 2021). Teknik *photo-elicitation* digunakan untuk memfasilitasi refleksi naratif, memperkuat memori pengalaman, serta menggali representasi tentang marginalisasi, identitas sebagai nelayan tradisional, dan bentuk resiliensi komunitas (Hodgetts *et al.*, 2020, 2022). Selama seluruh proses, observasi partisipatif dilakukan untuk merekam interaksi sosial, praktik komunitas, dan kondisi lingkungan fisik pesisir sebagai bagian dari *lived experience*. Data diperoleh melalui catatan lapangan, dokumentasi visual, dan transkrip wawancara. Analisis data dilakukan menggunakan *Reflexive Thematic Analysis* (RTA), analisis tersebut sesuai dalam penelitian ini (analisis fenomenologis) karena memposisikan pengalaman hidup serta makna subjektif partisipan sebagai pusat analisis, sekaligus mengakui peran aktif peneliti dalam menginterpretasikan, membangun, dan mengontekstualisasikan makna melalui praktik reflektif yang sistematis (Clarke & Braun, 2017). Tahapan analisis meliputi pembacaan ulang transkrip, pencatatan awal (*initial noting*), pengkodean tematik, pengembangan tema, serta interpretasi makna pengalaman partisipan dengan mempertimbangkan perspektif psikologi komunitas, relasi kekuasaan, dan struktur sosial yang mempengaruhi kehidupan nelayan tradisional (Smith & Osborn, 2015).

Gambaran umum sosial ekonomi nelayan tradisional pesisir di Kota Semarang

Kondisi sosial ekonomi nelayan di wilayah pesisir Semarang menunjukkan tingkat kerentanan yang relatif tinggi, terutama akibat ketergantungan pada sektor perikanan tangkap sebagai sumber utama penghidupan. Pendapatan nelayan bersifat tidak menentu dan fluktuatif karena bergantung pada kondisi cuaca, hasil tangkapan, serta kelayakan sarana produksi, khususnya perahu. Ketika perahu mengalami kerusakan, aktivitas melaut terhenti, sehingga nelayan kehilangan sumber pendapatan utama dalam jangka waktu yang tidak pasti.

Dalam kondisi keterbatasan modal dan minimnya cadangan keuangan, praktik berhutang menjadi strategi adaptif yang dianggap paling memungkinkan untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi keluarga. Hutang dimanfaatkan untuk membiayai perbaikan perahu agar nelayan dapat kembali melaut. Namun, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, disertai persyaratan jaminan yang sulit dipenuhi, mendorong nelayan untuk bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi. Ketergantungan ini membentuk pola hutang yang berkelanjutan, di mana hutang tidak lagi berfungsi sebagai solusi jangka pendek, tetapi justru memperdalam ketidakberdayaan ekonomi.

Tekanan ekonomi tersebut semakin kompleks karena sebagian besar nelayan berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Situasi ini mendorong mereka untuk mengambil keputusan finansial berisiko sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap keluarga. Meskipun demikian, keputusan untuk tetap berhutang demi memperbaiki perahu dan melanjutkan aktivitas melaut juga mencerminkan adanya ketahanan psikologis, yaitu kemampuan individu untuk mempertahankan fungsi adaptif dan peran sosialnya di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam konteks ini, hutang muncul sebagai respons atas tekanan ekonomi yang mendesak, khususnya ketika kapal yang merupakan sarana utama melaut mengalami kerusakan dan nelayan tidak memiliki cadangan keuangan. Kondisi tersebut tercermin dalam kutipan yang diutarakan oleh NK (nahkoda, 56 tahun) dan NG (nahkoda, 55 tahun) berikut:

“di saat perahu sudah rapuh dan mau diperbaiki tapi kondisinya gak punya uang inisiatifnya cari utangan. Kalau punya uang ya apa adanya (uang) itu diperbaiki, tapi kalau kurang mau tidak mau harus cari utangan.” – NK

“uang pinjaman cair ke BRI gak sampe segitu mbak, meskipun udah ngasih jaminan apapun, nah kekurangannya cari utangan ke rentenir, kalau ga ada yaudah kita jual-jual barang yang dipunya.” – NG

“kalo ga ngambil itu (hutang rentenir) ga bisa memperbaiki kapalnya terus ga dapet uang, semakin lama kita libur melaut ya semakin banyak utang” – NG

Selain kutipan-kutipan di atas, kondisi tersebut juga tergambar secara visual melalui dokumentasi perahu nelayan yang mengalami kerusakan sehingga nelayan tidak bisa melaut (Gambar 1).



Gambar 1. Perahu Rusak, Nelayan Terpaksa Berhenti Melaut.

Sumber: Maulani & Martiirini, 2025.

Kerusakan perahu menjadi titik krisis dalam kehidupan ekonomi nelayan, karena mereka akan kehilangan satu-satunya sumber pendapatan ketika perahu mengalami kerusakan. Dalam situasi ini, berhutang menjadi pilihan yang dianggap paling rasional untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga.

Kutipan-kutipan wawancara serta dokumentasi visual tersebut menggambarkan bagaimana tekanan ekonomi menjadi sumber stres utama bagi para nelayan yang dalam penelitian ini mayoritas telah berkeluarga. Tekanan ini mendorong nelayan untuk mengambil keputusan ekonomi yang berisiko sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga, meskipun disertai risiko baru seperti hutang yang terus menerus (Kundo *et al.*, 2023; Mozumder *et al.*, 2024; Yuniarti & Sukarniati, 2021). Keterbatasan akses terhadap sumber keuangan formal, seperti pinjaman bank yang mensyaratkan jaminan, turut memperkuat tekanan psikologis karena menimbulkan kekhawatiran akan kehilangan aset berharga (Iskander *et al.*, 2025; King *et al.*, 2021). Kondisi ini memunculkan tekanan ekonomi baru, di mana utang yang semula dianggap sebagai solusi justru menjadi “penyelamat semu” yang memperdalam ketidakberdayaan dan ketergantungan ekonomi. Siklus tersebut tidak hanya membatasi kebebasan finansial, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan psikologis, harga diri, serta persepsi individu terhadap kontrol diri (Biswas & Nautiyal, 2023; Calnitsky, 2018; Kantamaneni *et al.*, 2018). Meskipun demikian, keputusan untuk tetap berhutang demi memperbaiki

perahu dan kembali melaut menunjukkan adanya ketahanan psikologis (*psychological resilience*), yakni kemampuan individu untuk mempertahankan fungsi adaptif serta tanggung jawab sosialnya di tengah situasi penuh tekanan dan ketidakpastian ekonomi (Kuipers & de Jong, 2023; Wang *et al.*, 2025; Xie *et al.*, 2023).

Secara keseluruhan, gambaran sosial ekonomi nelayan pesisir Semarang menunjukkan adanya keterkaitan antara keterbatasan struktural, tekanan ekonomi keluarga, dan minimnya akses terhadap sumber daya finansial. Keterkaitan tersebut membentuk pola kerentanan yang berulang serta berdampak pada kesejahteraan material, psikologis, dan sosial nelayan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketidakberdayaan Nelayan Tradisional

Ketidakberdayaan nelayan tradisional dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan individu, tetapi merupakan bentuk ketidakberdayaan struktural yang dibentuk oleh relasi kuasa yang timpang antara nelayan tradisional, negara, dan aktor ekonomi yang lebih kuat dalam sistem perikanan pesisir (pasar dan mekanisme distribusi formal). Ketidakberdayaan ini termanifestasi dalam tiga ranah utama yaitu ekonomi, sosial, dan hukum. Secara ekonomi, ketidakberdayaan Nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK) dalam penelitian ini ditandai dengan adanya ketergantungan dan tidak adanya kendali atas keputusan pribadi. Ketergantungan yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah ketergantungan pada musim, alat tangkap, serta kondisi laut dalam

menjalankan pekerjaannya. Sementara, tidak adanya kendali ditunjukkan dengan minimnya kemampuan untuk memilih pekerjaan selain sebagai nelayan (nelayan merupakan pekerjaan turun-temurun yang diwariskan dari orang tua mereka). Hal ini ditunjukkan oleh kutipan FGD yang dituturkan oleh NK (nahkoda, 56 tahun) dan NG (nahkoda, 55 tahun):

“(pola Melaut) tergantung alatnya” - NG

“Kalau saya (pola melaut) tergantung musim. Ada musim paceklik, ramai dan biasa.” - NK

“Kalo memang ada gelombang besar gak bisa melaut, nelayan susah makannya dan biayanya.” - NG

“Saya ini lebih mendalami di laut karena sejak kecil sudah diajak orang tua melaut” - NG

“Saya memang dari kecil nelayan ya, sejak ikut orang tua saya sampai sekarang (orang tua) udah gak ada ya nelayan” - NG

Lebih lanjut, pola kerja yang bergantung pada musim, cuaca, dan alat tangkap menjadikan pendapatan nelayan bersifat fluktuatif (Abrar *et al.*, 2024). Pada saat cuaca cukup bersahabat dan hasil tangkapan cukup banyak, pendapatan nelayan akan cukup bahkan lebih untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Namun, ketika gelombang besar terjadi atau memasuki musim paceklik, aktivitas melaut turut terhambat sehingga pendapatan nelayan menurun drastis atau bahkan tidak ada sama sekali. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan pemenuhan kebutuhan dalam keluarga nelayan (Haque & Dey, 2017; Mukaila *et al.*, 2023). Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa ketergantungan terhadap sumber daya alam yang sulit diprediksi merupakan salah satu karakteristik kerentanan ekonomi masyarakat (Kantamaneni *et al.*, 2018; Mpuure & Mengba, 2024). Seharusnya, untuk menyelesaikan ketidakstabilan ekonomi keluarga akibat musim dan cuaca yang kurang bersahabat, nelayan mempunyai pekerjaan lain (Mitu *et al.*, 2021; Mustika *et al.*, 2023). Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa nelayan cenderung menunggu kondisi cuaca mendukung untuk aktivitas melaut ataupun menunggu panggilan pekerjaan darat. Ketidakberdayaan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai kondisi nelayan tidak sepenuhnya memiliki kendali atas pekerjaan, pola kerja, waktu kerja, dan pendapatan yang dihasilkan. Di samping itu, profesi nelayan yang diwariskan turun-temurun yang dialami tiga narasumber penelitian (NK, NG, AR) membatasi pilihan kerja dan membuat mereka terjebak dalam sistem pekerjaan yang sempit tanpa alternatif lain (Rahim *et al.*, 2021; Susilo *et al.*, 2021).

Ketergantungan ekologis tersebut berinteraksi dengan struktur pasar dan distribusi yang tidak berpihak pada nelayan, khususnya mekanisme Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sehingga membuat istri nelayan memilih untuk menjual ikan secara ecer. Hal tersebut ditunjukkan dengan kutipan FGD yang diungkapkan NK (nahkoda, 56 tahun) dan NG (nahkoda, 55 tahun) sebagai berikut:

“Masalahnya kadang kan TPI tuh minta uangnya agak sulit, maksudnya bukan dipersulit tapi harus menunggu. Kalau di TPI juga kadang ada potongannya. Padahal kan kita nelayan butuh uang cepet.” - NG

“banyak ibu-ibu yang menjual ikan secara kecil-kecilan (ecer) di kampung-kampung, otomatis barganya lebih bagus dari TPI.” - NK

Harga jual yang relatif rendah, adanya potongan biaya pengelolaan, serta lambatnya proses pembayaran di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) turut menambah ketidakberdayaan ekonomi nelayan. Pendapatan harian yang pada dasarnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari, menjadi semakin tertekan ketika uang hasil penjualan dari TPI tidak dapat diterima secara cepat yang membuat nelayan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini mendorong istri nelayan untuk menjual ikan secara ecer agar kebutuhan ekonomi keluarga dapat terpenuhi tanpa harus menunggu pembayaran yang tertunda di TPI. Strategi tersebut mencerminkan mekanisme koping ekonomi rumah tangga nelayan yang bersifat informal dan jangka pendek sebagai respons terhadap keterbatasan akses pasar secara formal (Anang *et al.*, 2024; Pomeroy *et al.*, 2020; Yuniarti & Sukarniati, 2021). Namun, upaya tersebut belum mampu menjamin kestabilan ekonomi keluarga nelayan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, meskipun terdapat inisiatif berupa usaha mandiri, nelayan masih berada dalam lingkaran ketidakpastian ekonomi yang sulit diputus tanpa ada dukungan struktural yang lebih kuat (Engle *et al.*, 2022; Mosepele & Kolawole, 2017).

Ketidakberdayaan ekonomi ini semakin nyata ketika pendapatan rata-rata nelayan bersifat harian yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kondisi ini membuat nelayan sulit untuk membangun perencanaan keuangan jangka panjang maupun mempersiapkan dana darurat (Yuniarti & Sukartini, 2021). Di sisi lain, rendahnya literasi keuangan membuat nelayan tidak memiliki strategi finansial dalam mengelola pendapatan mereka. Hal ini ditunjukkan dengan kutipan pernyataan NK (nahkoda, 56 tahun) sebagai berikut:

“Kalau satu kali melaut ya rata-rata cukup buat makan sehari.”

“dari dulu sampai sekarang hampir 90 persen nelayan ga bisa ngatur uang. Kalo ditanya sehari berapa (penghasilannya) gak bisa menjawab.”

Tidak adanya kepastian dan rendahnya pendapatan menjadikan utang sebagai satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup yang selanjutnya justru membuat situasi ekonomi semakin lemah dan rentan. Kondisi tersebut memperlihatkan kondisi kurangnya literasi finansial yang maknanya tidak hanya terkait dengan kondisi ekonomi yang lemah dan rentan, tetapi lebih jauh lagi terkait dengan keterbatasan pengetahuan dan sumber daya (Khaliq & Uspri, 2017; Pattipeilohy *et al.*, 2024; Putiarni *et al.*, 2022).

Dengan demikian, ketidakberdayaan ekonomi yang dirasakan nelayan tradisional tidak dapat dilihat sebagai persoalan perilaku individu semata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku berutang merupakan produk dari ketidakberdayaan struktural yang dihasilkan oleh kombinasi antara ketergantungan ekologis (musim dan cuaca) dan ketimpangan relasi pasar (mekanisme TPI). Dalam konteks ini, nelayan berada dalam posisi lemah berhadapan dengan aktor ekonomi yang lebih kuat. Mereka menghadapi mekanisme pembayaran yang lambat dan akses terbatas terhadap pinjaman formal. Hal tersebut memperlihatkan bahwa ketidakberdayaan ekonomi nelayan bersifat sistemik, yaitu bukan sekedar kemiskinan, tetapi kondisi terperangkap dalam relasi ekonomi yang timpang.

Selain dalam ranah ekonomi, ketidakberdayaan nelayan juga termanifestasi dalam ranah sosial, terutama melalui ketimpangan relasi kerja antara Anak buah kapal (ABK) dengan pemilik kapal (Nahkoda) serta tidak adanya jaminan penghasilan ketika kapal rusak memperkuat ketidakberdayaan pada ABK. Hal ini ditunjukkan oleh kutipan FGD yang dituturkan oleh NG (nahkoda, 55 tahun), DL (ABK, 38 tahun), dan AR (ABK, 23 tahun) sebagai berikut :

“ABK itu ikut sama pemiliknya. Kalo berangkat malam ya malam, siang ya siang, sore ya sore. Alat tangkapnya juga ngikut nahkoda aja.” - DL

“Setelah melaut itu dibitung hasilnya berapa, nanti diambil berapa, sisanya dibagi. Yang punya (kapal) setengah, setengahnya lagi dibagi ke ABK” - NG

“Kalo ABK ya manut aja diminta berangkat ya berangkat melaut diminta libur ya libur.” - AR

“Kalo dukanya (jadi ABK) kalo ada perbaikan (kapal) ya libur dulu” - AR

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ABK tidak memiliki otonomi dalam menentukan waktu kerja, jenis alat tangkap, maupun skema pembagian hasil. Semua keputusan itu ditentukan oleh pemilik kapal. Ketika kapal mengalami kerusakan, ABK otomatis berhenti melaut sehingga pendapatan mereka pun terhenti. Kondisi ini menunjukkan hubungan patron-klien yang umum ditemukan dalam sektor perikanan tradisional, di mana otoritas melaut sepenuhnya ada di tangan pemilik kapal, sementara ABK diposisikan sebagai pihak yang pasif atau menunggu kapan melaut dan saat dibutuhkan oleh pemilik kapal (Firzan, 2017; Miñarro *et al.*, 2016; Roberts *et al.*, 2022). Kondisi pasif atau minimnya inisiatif pada individu, dalam hal ini adalah ABK dan nelayan tradisional tentunya dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu hal yang melatarbelakangi adalah faktor pendidikan. Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemauan untuk terbuka dan mempelajari hal-hal baru, yang ditunjukkan oleh ungkapan NK (nahkoda, 56 tahun) berikut:

“supaya nelayan tuh pakai safety. Tapi yang namanya nelayan tuh kan susah. Satu alasannya ribet karena kan nelayan itu ga seperti di darat, gerakannya harus cepat dan lincah. Kalo pake pelampung kan gerakannya susah, kadang-kadang kan dinas udah nyaranin hal bagus dan gak diterima ya udah terserah.”

Berdasarkan kutipan tersebut di atas dapat dilihat bahwa sudah ada upaya dari pemerintah untuk mengedukasi nelayan dengan berbagai pengetahuan terkait melaut dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan. Namun, hal ini tidak dianggap penting atau diabaikan karena ‘merubah’ tradisi yang sudah dilakukan bertahun-tahun.

Dalam ranah hukum, ketidakberdayaan nelayan tradisional tampak dari lemahnya perlindungan hukum serta terbatasnya akses nelayan terhadap mekanisme legal formal, terutama terkait kepemilikan kapal, perizinan, dan pemahaman atas hak-hak mereka. Hal tersebut ditegaskan oleh pernyataan wawancara A (ketua KNTI, 39 Tahun):

“Ada nelayan yang cerita sama saya, 20 tahun punya kapal gak punya surat-surat, perizinannya atau kalau mau ngurus surat-surat tuh biasanya lama kalau ga pake ‘uang’. Nelayan juga kadang gak paham hak-hak mereka mbak, mungkin salah satu penyebabnya karena tingkat pendidikan yang rendah jadi mereka belum ‘melek’ hukum.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketidakberdayaan yang dialami nelayan serta anak buah kapal (ABK) dalam penelitian ini bersifat multidimensi dan berakar pada struktur yang

saling terjalin, bukan hanya sekadar keterbatasan individual. Ketidakberdayaan tersebut berawal dari dependensi atau ketergantungan nelayan pada kondisi alam, musim, alat tangkap, serta minimnya alternatif pekerjaan karena profesi nelayan bersifat turun-temurun membatasi pilihan ekonomi mereka yang membuat pendapatan nelayan tidak stabil. Kondisi ini diperparah dengan struktur pasar dan mekanisme distribusi yang tidak berpihak pada nelayan, terutama melalui praktik di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ditandai dengan harga rendah, potongan biaya, dan keterlambatan pembayaran.

Di ranah sosial, relasi kerja yang tidak setara antara ABK serta pemilik kapal membuat kurangnya otonomi ABK dalam menentukan waktu kerja serta pembagian hasil, sehingga mereka tidak memiliki kendali penuh atas pilihan pekerjaan, pola kerja, maupun pendapatan (Castillo *et al.*, 2025; Sanon *et al.*, 2021). Sementara itu, pada ranah hukum, lemahnya legalitas kepemilikan kapal, birokrasi perizinan yang berbelit, praktik informal ‘uang pelicin’, dan rendahnya literasi hukum nelayan menempatkan mereka dalam posisi semi-informal yang rentan terhadap penindasan dan keterbatasan akses perlindungan negara. Seluruh temuan ini menunjukkan bahwa ketidakberdayaan nelayan terbentuk melalui interaksi antara kerentanan ekologis, keterbatasan ekonomi, relasi sosial yang timpang, dan hambatan struktural dalam sistem hukum yang bersama-sama membentuk ‘lingkaran keterbatasan’ yang sulit diputus tanpa perubahan struktural yang lebih adil (Salmi *et al.*, 2022; Sudarmono, 2023).

Ketahanan Komunitas pada Masyarakat Pesisir

Selain ketidakberdayaan struktural dalam ranah ekonomi, sosial, dan hukum, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya strategi kolektif yang berkontribusi pada pembentukan ketahanan komunitas (*community resilience*) masyarakat pesisir. Ketahanan ini tidak hanya bersumber dari kapasitas individu, tetapi dibangun juga melalui relasi gender yang saling melengkapi, solidaritas sosial, serta dukungan organisasi lokal sebagai mekanisme bertahan hidup kolektif (Kuipers & de Jong, 2023; Wang *et al.*, 2025; Xie *et al.*, 2023).

Dalam aspek budaya dan relasi gender, aktivitas melaut tidak hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi terdapat makna sosial, budaya, serta peran gender yang kuat dalam masyarakat pesisir. Bagi nelayan, melaut merupakan bentuk tanggung jawab, kehormatan, sekaligus maskulinitas dalam memenuhi peran sebagai kepala

keluarga, yang ditunjukkan dengan pernyataan NG (nahkoda, 55 tahun) sebagai berikut:

“Sukanya kalau udah berangkat ke laut bisa nafkabin istri dan anak, ketika dapat ikan banyak buru-buru mau pulang jadi istri senang.”

“Yang jelas tangkapan banyak tuh pas musim bujan. Kan gelombang dari barat itu tinggi itupun buat nelayan yang berani.”

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa pengalaman nelayan dalam melaut tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sumber makna psikososial yang berkaitan dengan peran dan identitas mereka dalam keluarga. Kemampuan menafkahi istri dan anak dengan melaut memberikan rasa kepuasan dan kebanggaan yang memperkuat identitas diri sebagai laki-laki yang bertanggung jawab (Jarska, 2021; Juniarta & Lentari, 2020; Letourneau *et al.*, 2024). Selanjutnya hal ini menjadi penguatan emosi (*emotional reinforcement*) yang mendorong nelayan untuk terus melaut, meskipun mereka menyadari adanya risiko besar di laut (McKinley *et al.*, 2021). Penguatan emosional dari keluarga berperan sebagai motivasi yang memperkuat komitmen nelayan terhadap peran sosialnya, meskipun kerap kali berada dalam kondisi yang berisiko (Knudsen & Gron, 2010). Dalam konteks yang lebih luas, komunitas, keberanian menghadapi bahaya dan kemampuan mempertahankan kesejahteraan keluarga dipandang sebagai wujud nilai kolektif tentang ketangguhan dan kehormatan laki-laki (Kisbu *et al.*, 2023; Shirani *et al.*, 2012). Temuan ini mencerminkan bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan emosional saling berinteraksi dalam membentuk makna kerja dan identitas diri nelayan sebagai bagian dari sistem komunitasnya (X. Wu & Yuan, 2023).

Sementara itu, perempuan sebagai istri nelayan juga berperan aktif dalam menopang perekonomian keluarga dengan mengolah dan menjual hasil tangkapan nelayan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk adaptasi atas tidak menentunya pendapatan suami sekaligus wujud nyata kontribusi perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga (Agha, 2021; Lei, 2023). Hal ini ditunjukkan oleh kutipan *go along interview* dan FGD yang dilontarkan oleh AR (ABK, 23 tahun) dan NG (nahkoda, 55 tahun) sebagai berikut:

“Ya paling kalo untuk upaya meningkatkan kesejahteraan tadi ada kumpulan ibu-ibu yang kita lewatin tadi di pinggir jalan. Itu ibu-ibu yang mau cari sampingan buat bantu suaminya dengan beli kerang ke nelayan langsung, direbus, diambil dagingnya, dan dijual lebih mahal.” - AR

“Istri saya dagang ikan di pasar. Tapi gak pasar sini, pasar di Semarang tengah. Istri beli ikan di pasar kabong terus di jual di sana. Ada kadang-kadang sedikit ambil dari hasil melaut saya” - NG

Kegiatan mengolah ataupun menjual hasil tangkapan nelayan dilakukan para perempuan sebagai istri untuk memberikan tambahan pendapatan rumah tangga. Hal ini memperlihatkan adanya upaya perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan suami (Gyan & Mfoafo-M’Carthy, 2022; Lecoutere & Wuyts, 2021).

Pada gambar 2 memperlihatkan bahwa peran gender dalam masyarakat pesisir menciptakan relasi yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama di laut, sementara perempuan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dengan berdagang dan mengolah hasil tangkapan. Perpaduan peran ini menciptakan sistem ekonomi keluarga nelayan yang berbasis gender namun berkolaborasi untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Di sisi lain, ketahanan komunitas pesisir juga diperkuat oleh jaringan sosial yang menjadi ciri khas pada penelitian ini ditandai dengan rasa solidaritas yang muncul secara spontan serta sukarela terutama saat membantu nelayan lain mengalami kecelakaan di laut. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa tenaga, tetapi juga penggunaan sumber daya pribadi sebagai wujud kepedulian dan saling jaga antar sesama. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan FGD oleh NG (nahkoda, 55 tahun) dan NK (nahkoda, 56 tahun) sebagai berikut:

“Bantunya biasanya tenaga. Kalau denger ada perahu tenggelam ya kita inisiatif langsung nyari pake solar sendiri tanpa disuruh, kadang-kadang bantu narik kapalnya.” - NG

“Itu sudah menjadi tradisi. Semaksimal mungkin dibantu, gotong royong lah. Itu udah jadi ciri khas tradisional nelayan.” - NK

Meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi, nelayan tetap menunjukkan solidaritas yang tinggi dengan memberikan bantuan berupa bahan bakar pribadi serta tenaga untuk membantu rekan sesama nelayan ketika terjadi kecelakaan di laut. Tindakan ini menandakan bahwa jaringan sosial antar nelayan tercermin dalam nilai gotong royong, kepedulian, kepercayaan (*trust*), dan saling menjaga menjadi bentuk rasa aman yang muncul ketika kurangnya bantuan dari pihak formal seperti pemerintah maupun lembaga penyelamat (Koopman, 2021; Slikkerveer, 2019). Dengan demikian, jaringan sosial sesama nelayan berupa gotong royong bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial informal yang menjaga keberlangsungan hidup komunitas pesisir dalam menghadapi risiko di laut (Syarif & Malik, 2025).

Pada level yang lebih terorganisir, jaringan sosial di wilayah pesisir juga ditunjukkan melalui Organisasi non-Pemerintah seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang berperan sebagai wadah kolektif yang menghimpun solidaritas antar nelayan dengan menyalurkan keluhan, saran, ataupun kebutuhan nelayan kepada pihak terkait. Pada level yang lebih terorganisir, solidaritas dalam komunitas dapat berkembang menjadi aksi kolektif yang bertujuan memperkuat posisi tawar kelompok nelayan (Sumitro *et al.*, 2022). Selain itu, KNTI juga mendorong pelestarian lingkungan serta kerja sama lintas kelompok, yang ditunjukkan dengan penuturan DL (ABK, 38 tahun) sebagai berikut:

“Nelayan kalo ada masalah laporan ke KNTI ya kita tampung. Nanti suatu saat ada waktu kita laporan ke dinas.”



Gambar 2. Pengolahan Hasil Tangkap Oleh Istri Nelayan.

Sumber : Maulani & Martiari, 2025.

“Kemarin seminggu yang lalu ada penanaman mangrove juga disini oleh KNTI, akpeln, dan ibu-ibu. Sering setahun sekali mbak nanam (mangrove).”

Meskipun berbasis komunitas yang dijalankan secara swadaya, KNTI berperan sebagai wadah penyampaian aspirasi yang membantu nelayan memperoleh “suara” dalam memperjuangkan hak serta kebutuhan mereka. Hal tersebut penting mengingat posisi nelayan yang kerap lemah di hadapan pemerintah ataupun ketika terhimpit kebijakan yang tidak berpihak. Selain itu, kegiatan rutin KNTI seperti penanaman mangrove tidak hanya memperkuat kebersamaan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan sebagai sumber pendapatan utama masyarakat pesisir. Jaringan sosial berupa organisasi ini mencerminkan dimensi *community empowerment*, yaitu kemampuan kolektif yang mampu menjadi salah satu upaya yang membantu nelayan menghadapi keterbatasan struktural meskipun belum sepenuhnya mengatasi ketidakberdayaan yang mereka alami (Zimmerman, 1995).

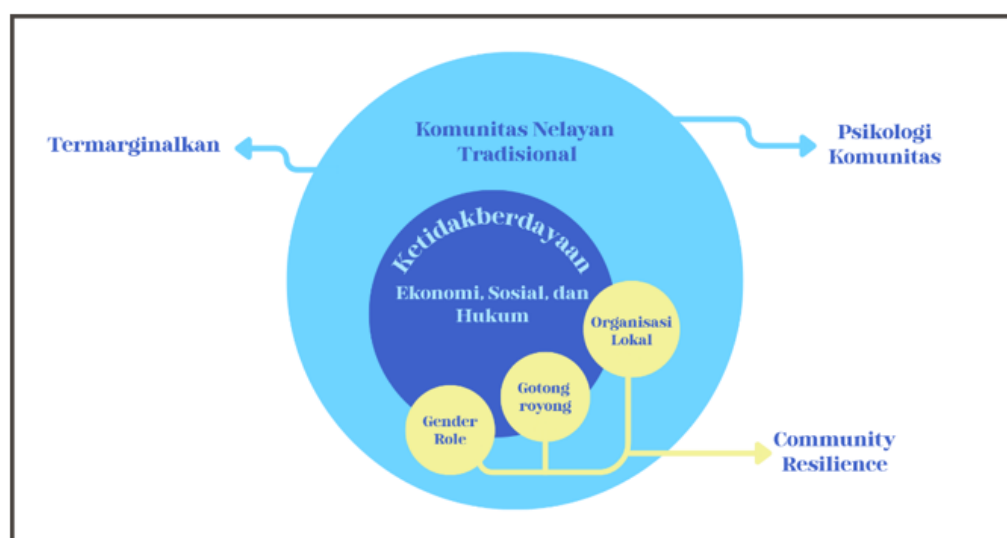
Jaringan sosial dalam komunitas nelayan tidak hanya dilihat sebagai nilai tradisional masyarakat pesisir, tetapi juga berkembang menjadi hal yang memperkuat ketahanan sosial nelayan dalam menghadapi berbagai risiko dan keterbatasan. Melalui praktik saling membantu dan peran organisasi seperti KNTI, komunitas nelayan mampu menjaga solidaritas serta mendukung keberlanjutan kehidupan mereka. Meskipun nilai tersebut belum sepenuhnya mengatasi ketidakberdayaan yang mereka alami, adanya solidaritas yang spontan antar nelayan serta dukungan organisasi seperti KNTI memberikan sedikit “angin segar” untuk tetap

bertahan, merasa aman, dan memiliki suara dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan komunitas (*community resilience*) masyarakat pesisir terbentuk melalui kombinasi antara relasi gender yang saling melengkapi, solidaritas sosial berbasis gotong royong, serta dukungan organisasi lokal seperti KNTI. Meskipun strategi ini tidak sepenuhnya menghapus ketidakberdayaan struktural nelayan, praktik tersebut memberikan modal sosial, rasa aman, dan kemampuan bertahan bersama yang memungkinkan komunitas pesisir tetap beradaptasi di tengah tekanan ekonomi, sosial, dan hukum.

Dinamika Ketidakberdayaan dan *Community Resilience* pada Komunitas Nelayan di Pesisir Kota Semarang

Penelitian ini menggunakan perspektif psikologi komunitas untuk memahami kehidupan nelayan tradisional dalam konteks komunitas yang termarginalkan dalam *setting* budaya kolektif (Hodgetts *et al.*, 2020; Nguyen *et al.*, 2025). Kondisi marginalisasi yang ditandai oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya serta ketidakberdayaan, di sisi lain juga disertai dengan temuan positif yaitu kemampuan bertahan bersama-sama atau *resilience* sebagai sebuah komunitas yang ditunjukkan dengan relasi gender yang saling melengkapi, saling membantu antar sesama (gotong-royong), serta peran organisasi lokal (Wei *et al.*, 2024). Hal ini merefleksikan bahwa nilai-nilai budaya kolektif masih melekat kuat dan ‘hidup’ dalam keseharian nelayan tradisional di kawasan pesisir. Dalam konteks ini, kondisi nelayan tradisional marginal tergambar



Gambar 3. Visualisasi Dinamika Temuan Penelitian.

Sumber : Maulani & Martiarini, 2025.

melalui temuan ketidakberdayaan, baik yang dialami nelayan maupun Anak Buah Kapal (ABK). Ketidakberdayaan dalam penelitian ini, ditunjukkan oleh kondisi ketergantungan (*dependensi*) sehingga minim kendali atas keputusan pribadi dan menghalangi peluang nelayan untuk memperbaiki kehidupan mereka (Chaerunissa, 2025). Secara lebih spesifik, ketergantungan yang dimaksud terkait dengan musim, alat tangkap, serta kondisi laut dalam menjalankan pekerjaannya. Sementara, tidak adanya kendali ditunjukkan dengan minimnya kemampuan untuk memilih pekerjaan selain sebagai nelayan (nelayan merupakan pekerjaan turun-temurun yang diwariskan dari orang tua mereka).

Kondisi ini menggambarkan bahwa keputusan yang diambil nelayan tidak hanya berdasarkan kapasitas individu semata, melainkan pengaruh dari faktor eksternal berupa keadaan alam, struktur sosial, lemahnya legalitas kepemilikan kapal, dan kurangnya pengetahuan nelayan terhadap hak-hak mereka yang membatasi akses serta kontrol mereka. Konsep *Psychological empowerment* menjelaskan bahwa berdayanya seseorang atau sekelompok orang tidak hanya bergantung pada keyakinan atas kompetensi diri, tetapi juga pada kesempatan mengakses kontrol sosial dan sumber daya (Zimmerman, 1995). Maka, ketidakberdayaan yang dialami nelayan pada penelitian ini bukanlah kegagalan personal, melainkan bentuk ketidakberdayaan struktural yang berawal dari *dependensi* (Rashid *et al.*, 2025; Sidik & Habibi, 2024).

Kondisi tidak berdaya ini selanjutnya diperburuk oleh praktik berutang yang muncul sebagai “penyelamat semu” atau alternatif pilihan jangka pendek dalam menghadapi persoalan ekonomi (Achtziger, 2022). Utang yang awalnya dianggap mampu membantu memenuhi kebutuhan mendesak, justru menimbulkan tekanan ekonomi baru. Akses pinjaman formal yang kerap mengharuskan memberikan jaminan ataupun rentenir yang menetapkan bunga tinggi sehingga memunculkan tekanan ekonomi baru bagi mereka. Mekanisme utang ini menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup nelayan tidak sepenuhnya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh relasi kuasa yang menetapkan mereka dalam posisi bergantung sehingga menimbulkan ketidakberdayaan ekonomi (Sgambati, 2022). Kondisi tersebut sejalan dengan konsep kemiskinan struktural (*structural poverty*) yakni kondisi kemiskinan yang tidak hanya terjadi karena kesalahan individu, tetapi juga karena peluang, sumber daya, serta sistem yang menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan sehingga mereka sulit keluar dari kemiskinan (Calnitsky, 2018; Pinem *et al.*, 2019).

Akan tetapi, meskipun nelayan dan ABK dalam penelitian ini berada dalam kondisi yang penuh keterbatasan dan menunjukkan ketidakberdayaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai kolektif yang menjadi kekuatan bagi nelayan dan ABK untuk bertahan dan bertumbuh (Berenji *et al.*, 2021; He *et al.*, 2022). Peran gender yang saling melengkapi antara nelayan sebagai pencari nafkah utama dengan perempuan atau istri nelayan yang turut menopang ekonomi keluarga dengan mengolah dan menjual hasil laut menunjukkan adanya potensi menuju relasi yang lebih setara dalam masyarakat pesisir khususnya pada aspek ekonomi (Wulandari *et al.*, 2022). Dengan kata lain, pendapatan rumah tangga tidak hanya bergantung pada hasil tangkap, tetapi juga terdapat kreativitas perempuan dalam mengelola sumber daya laut secara produktif.

Selain itu, jaringan sosial masyarakat pesisir berupa nilai gotong royong antar sesama nelayan maupun melalui organisasi non pemerintah menjadi mekanisme perlindungan satu sama lain ketika menghadapi risiko kerja, situasi darurat, maupun kebutuhan advokasi nelayan dalam menyuarkan hak serta keluhan mereka ke pihak terkait. Hal tersebut berkaitan dengan konsep *social capital* Putnam (1993) yang menjelaskan bahwa nilai sosial seperti rasa percaya satu sama lain, kerjasama antar anggota, maupun asosiasi dengan organisasi sukarela mampu memperkuat kapasitas komunitas untuk bertahan dan saling melindungi (Siisiäinen, 2003).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran gender yang mengarah pada *equality*, nilai gotong royong (*collective value*) dan peran organisasi non-pemerintah menunjukkan adanya *community resilience*, yaitu kemampuan sebuah komunitas untuk bertahan, beradaptasi, serta mempertahankan fungsi sosial meskipun berada di tengah keterbatasan (Norris *et al.*, 2008). Hal tersebut memungkinkan komunitas nelayan tradisional mampu beradaptasi, bertahan, serta tetap menjaga keberlangsungan hidup mereka meskipun menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakberdayaan struktural.

PENUTUP

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakberdayaan nelayan tradisional terbentuk secara multifaktorial melalui tekanan struktural, ekonomi, sosial, hukum, serta kondisi alam yang menimbulkan ketergantungan (*dependensi*). Ketergantungan pada faktor eksternal seperti kondisi alam, relasi kerja yang tidak setara, minimnya alternatif pekerjaan, serta terbatasnya akses terhadap pinjaman formal membuat nelayan sulit mengontrol

keputusan dan mengubah hidup mereka. Dengan demikian, ketidakberdayaan yang dialami bukan semata akibat keterbatasan individu, tetapi juga merupakan konsekuensi dari struktur sosial dan ekonomi yang kurang memihak.

Di tengah tekanan tersebut, muncul dinamika ketahanan komunitas berupa nilai-nilai kolektif seperti gotong royong, relasi gender yang saling melengkapi, serta dukungan melalui organisasi non-pemerintah. Nilai gotong royong hadir sebagai mekanisme informal yang menyediakan rasa aman dan solidaritas ketika bantuan formal tidak memadai. Di lain sisi, kontribusi perempuan dalam menopang ekonomi rumah tangga memperlihatkan bahwa ketahanan keluarga nelayan terbentuk melalui kerja sama lintas peran, bukan hanya bergantung pada hasil melaut semata. Selain itu, keberadaan organisasi non-pemerintah berperan sebagai advokasi yang memfasilitasi penyampaian aspirasi serta kebutuhan bagi nelayan untuk memperoleh pengakuan serta dukungan yang setara.

Sintesis dari temuan ini menegaskan bahwa ketidakberdayaan dan ketahanan komunitas tidak bekerja sebagai dua kutub yang saling meniadakan, tetapi hadir berdampingan dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ketidakberdayaan lahir dari kondisi struktural yang saling tumpang tindih dan mengekang, sementara ketahanan komunitas terbentuk dari nilai, peran gender yang saling melengkapi, dan budaya kolektif yang memungkinkan komunitas tetap bertahan meskipun berada dalam kondisi marginal. Dengan demikian, fenomena pada nelayan tradisional memperlihatkan bahwa komunitas yang termarginalkan tetap memiliki kemampuan adaptif, meskipun kapasitas tersebut kerap dibatasi oleh struktur sosial yang lebih besar.

Berdasarkan temuan penelitian ini, rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan berupa perlunya peran aktif pemerintah dalam mengurangi ketidakberdayaan nelayan tradisional melalui perlindungan dan pemberdayaan komunitas. Penguatan nilai gotong royong komunitas nelayan sebagai basis pemberdayaan yang berkelanjutan perlu dilembagakan melalui kebijakan yang membentuk dan menguatkan kelompok nelayan berbasis komunitas, koperasi lokal, serta skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi kerja nelayan. Pemerintah dapat berperan dengan menyediakan akses pembiayaan formal yang ramah nelayan, perlindungan hukum dalam relasi kerja dan akses sumber daya laut, serta pengakuan terhadap peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga melalui program pemberdayaan yang inklusif

gender. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan komunitas (*community resilience*), tetapi juga mengurangi ketergantungan dan ketidakberdayaan nelayan terhadap faktor eksternal. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah partisipan yang relatif kecil serta konteks wilayah yang spesifik, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Namun, penelitian ini tidak memiliki konflik kepentingan dari pihak manapun. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas relasi antara ketidakberdayaan dan ketahanan komunitas, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika komunitas marginal masyarakat pesisir dan mengembangkan kebijakan perlindungan yang lebih kontekstual bagi komunitas nelayan tradisional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat Tambak Lorok, Kota Semarang yang menjadi narasumber dalam penelitian ini serta berbagai pihak yang membantu dari segi materil, maupun psikologis.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis dalam penulisan makalah ini adalah: Rahmaniar Maulani sebagai kontributor utama, Nuke Martiarini sebagai kontributor anggota. Penulis menyatakan bahwa Surat Kontribusi Penulis telah dilampirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, U., Febrianto, A., Norhaliza, S., Shabrina, U. N., Ul Umam, N., Hasanah, W., & Aisyuzzalluma, M. (2024). Edukasi Ketidakstabilan Harga Ikan yang Berdampak Pada. *Jurnal Abdimas Sosek*, 4(2), 2024.
- Achtziger, A. (2022). Overspending, debt, and poverty. *Current Opinion in Psychology*, 46, 101342. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101342>.
- Agha, N. (2021). *Household Power Structure and Women's Negotiation with Patriarchy* (pp. 169–210). https://doi.org/10.1007/978-981-16-6859-3_6.
- Anang, S. A., Otchere-Peprah, K., Aidoo-Mensah, D., Mensah, N. O., Nakuja, T., & Boateng-Gyambiby, D. (2024). Livelihood diversification and coping strategies: evidence from small-scale fish farmers in Ghana. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2433712>.
- Anwar, Z., Si, M., Wahyuni, D., & Sos, S. (2019). *Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan*.

- Bambra, C. (2022). Placing intersectional inequalities in health. *Health & Place*, 75, 102761. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2022.102761>.
- Baskoro, A., & Hoffah, H. (2023). Instabilitas tata kelola kelautan dan perikanan: Perizinan, kewenangan, dan dampak terhadap masyarakat pesisir. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3).
- Berenji, S., Nayak, P. K., & Shukla, A. (2021). Exploring Values and Beliefs in a Complex Coastal Social-Ecological System: A Case of Small-Scale Fishery and Dried Fish Production in Sagar Island, Indian Sundarbans. *Frontiers in Marine Science*, 8. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.79597.3>
- Biswas, S., & Nautiyal, S. (2023). A review of socio-economic vulnerability: The emergence of its theoretical concepts, models and methodologies. *Natural Hazards Research*, 3(3), 563–571.
- Bush, E. J., Singh, R. L., & Kooienga, S. (2019). Lived Experiences of a Community: Merging Interpretive Phenomenology and Community-Based Participatory Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 18. <https://doi.org/10.1177/1609406919875891>.
- Calnitsky, D. (2018). Structural and individualistic theories of poverty. *Sociology Compass*, 12(12). <https://doi.org/10.1111/soc4.12640>.
- Castillo, L. S., Ferguson Irlanda, C. E., Aceves-Bueno, E., Froehlich, H. E., Mancilla, C., Rivera, A., & Gaines, S. D. (2025). Aquaculture isn't always the answer: rethinking blue transitions through justice and community experience. *Global Environmental Change*, 94, 103046. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2025.103046>.
- Causadias, J. M., & Umaña-Taylor, A. J. (2018). Reframing marginalization and youth development: Introduction to the special issue. *American Psychologist*, 73(6), 707–712. <https://doi.org/10.1037/amp0000336>.
- Chaerunissa, C. A. (2025). Marginalisasi dan Mekanisme Survival Komunitas di Kawasan Wisata Kenjeran Park Surabaya. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 213–230. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10641>.
- Chen, J., Cao, J., Fu, S., & Jia, X. (2022). Associations Between Relative Deprivation and Life Satisfaction During the COVID-19 Lockdown: Results of Serial Mediation Analyses. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.725373>.
- Chen, X. (2015). Relative deprivation and individual well-being. *IZA World of Labor*. <https://doi.org/10.15185/izawol.140>.
- Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. *The Journal of Positive Psychology*, 12(3), 297–298. <https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1262613>.
- Engle, C. R., Hanson, T., & Kumar, G. (2022). Economic history of U.S. catfish farming: Lessons for growth and development of aquaculture. *Aquaculture Economics & Management*, 26(1), 1–35. <https://doi.org/10.1080/13657305.2021.1896606>.
- Faradillah, C. V., Basri, M. A., Sari, E., Purwanto, A., & Wijaya, A. I. (2024). Viktimisasi terhadap transparansi sebagai kelompok marginal. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 23(1), 85–98. <https://doi.org/10.14421/musawa.2024.223.85-98>.
- Feng, J., Wen, Y., Zhang, H., Hou, Y., & Zhang, Z. (2024). Trap or Opportunity: Impact of the Fishing Ban Compensation Policy on the Income of Returning Fishermen in China. *Sustainability (Switzerland)*, 16(11). <https://doi.org/10.3390/su16114401>.
- Firzan, M. (2017). Hubungan Patron-Klien Masyarakat Nelayan di Kampung Tanjung Limau Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 2017(3), 29–43.
- Fitriyani, S. N., Tri, D., & Faridh, A. (2021). Intervensi Komunitas Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Pada Kelompok Marginal Piyungan Yogyakarta Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama. In *Jurnal Studi Agama-Agama* (Vol. 7, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/>.
- Ghosh, S., & Das, D. N. (2021). Marginalisation and power politics in local governance: a study of a small town in India. *Development in Practice*, 31(2), 226–237. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1836126>.
- Gustavsson, M., & Riley, M. (2018). The Fishing Lifecourse: Exploring the Importance of Social Contexts, Capitals and (More Than) Fishing Identities. *Sociologia Ruralis*, 58(3), 562–582. <https://doi.org/10.1111/soru.12181>.
- Gyan, C., & Mfofo-M'Carthy, M. (2022). Women's participation in community development in rural Ghana: The effects of colonialism, neoliberalism, and patriarchy. *Community Development*, 53(3), 295–308. <https://doi.org/10.1080/15575330.2021.1959362>.
- Halim, A., Wiryawan, B., Loneragan, N. R., Hordyk, A., Fedi, M., Sondita, A., White, A. T., Koeshendrajana, S., Ruchimat, T., Pomeroy, R. S., & Yuni, C. (2018). *Developing a functional definition of small-scale fisheries in support of marine capture fisheries management in Indonesia* Developing a functional definition of small-scale fisheries in support of marine capture 1 fisheries management in Indonesia 2.
- Haque, A. B. M. M., & Dey, M. M. (2017). Impacts of community-based fish culture in seasonal floodplains on income, food security and employment in Bangladesh. *Food Security*, 9(1), 25–38. <https://doi.org/10.1007/s12571-016-0629-z>.

- He, Y., Huang, S., & Tang, Y. (2022). Sustainable Practicalities towards Good Governance in Fish Townships and Villages by Ethics-Based Approach. *Sustainability*, *14*(12), 7505. <https://doi.org/10.3390/su14127505>.
- Hikmah, H., & Nasution, Z. (2018). UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *7*(2), 127. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6464>.
- Hodgetts, D., Andriolo, A., Stolte, O., & King, P. (2022). An impressionistic orientation towards visual inquiry into the conduct of everyday life. *Qualitative Research in Psychology*, *19*(3), 831–852. <https://doi.org/10.1080/14780887.2021.1901165>.
- Hodgetts, D., Chamberlain, K., & Groot, S. (2020). Impressionist reflections on visual research in community research and action. In *A Handbook of Visual Methods in Psychology* (pp. 519–535). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351032063-3530>.
- Ilham, L., Farid UIN Sunan Kalijaga, A., & Adisucipto, S. (2019). KEBAHAGIAAN DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT MARJINAL (Studi Masyarakat Desa Hadipolo Argopuro Kudus Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, *13*(2), 1978–4457. <https://doi.org/10.14421/IJSA>.
- Iskander, D., Picchioni, F., Zanello, G., Guermond, V., & Brickell, K. (2025). Sick of debt: How over-indebtedness is hampering health in rural Cambodia. *Social Science & Medicine*, *367*, 117678. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.117678>.
- Isrofi, M. H. A., & Gunawan. (2025). Studi Ketahanan Sosial Masyarakat Tambak Lorok dalam Menghadapi Bencana Rob. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, *4*(1), 50–61. <https://doi.org/10.32734/ljsp.v4i1.20803>.
- Istiqomah, T. (2018). GENDER ANALYSIS THE ROLE OF WOMEN AS STIMULATORS ECONOMY OF FISHERIES IN SIDOARJO COASTAL DISTRICT. *Fish Scientiae*, *8*(1). <https://doi.org/10.20527/fs.v8i1.213>.
- Jarska, N. (2021). Men as Husbands and Fathers in Postwar Poland (1956–1975): Towards New Masculine Identities? *Men and Masculinities*, *24*(4), 630–651. <https://doi.org/10.1177/1097184X20910492>.
- Juniarta, P. O., & Lentari, F. R. M. (2020). Gambaran Konsep Diri Suami yang Tidak menjadi Pencari Nafkah Utama. *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, *4*(1), 61–86. <https://doi.org/10.28932/humanitas.v4i1.2405>.
- Kantamaneni, K., Phillips, M., Thomas, T., & Jenkins, R. (2018). Assessing coastal vulnerability: Development of a combined physical and economic index. *Ocean & Coastal Management*, *158*, 164–175. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.03.039>.
- Khaliq, A., & Uspri, B. (2017). KEMISKINAN MULTIDIMENSI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL. *Business Management Journal*, *13*(2). <https://doi.org/10.30813/bmj.v13i2.921>.
- King, T. J., Turner, R., Versace, V., Abernethy, K., Kilpatrick, S., & Brumby, S. (2021). Mental health in the commercial fishing industry: Modern uncertainties and traditional risks. *Fish and Fisheries*, *22*(5), 1136–1149. <https://doi.org/10.1111/faf.12572>.
- Kisbu, Y., Akçınar, B., Kuşçul, G. H., Bozok, M., Turunç, G., & Fişek, G. (2023). Protective and risk factors associated with involved fatherhood in a traditional culture. *Family Relations*, *72*(1), 294–324. <https://doi.org/10.1111/fare.12679>.
- Knudsen, F., & Gron, S. (2010). Making sense of fishermen's risk perception. *Policy and Practice in Health and Safety*, *8*(2), 77–94. <https://doi.org/10.1080/14774003.2010.11667749>.
- Koopman, J. (2021). The restoration of *gotong royong* as a form of post-disaster solidarity in Lombok, Indonesia. *South East Asia Research*, *29*(3), 279–296. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2021.1966318>.
- Kuipers, K., & de Jong, E. B. P. (2023). Resilient Livelihood Styles: An enriched perspective on household livelihood resilience in the sensitive natural environments of Indonesia. *Regional Environmental Change*, *23*(4), 164. <https://doi.org/10.1007/s10113-023-02155-7>.
- Kundo, H. K., Brueckner, M., Spencer, R., & Davis, J. K. (2023). Enhancing the resilience and well-being of rural poor to climate risks: are the economic functions of social protection enough? *Disasters*, *47*(3), 651–675. <https://doi.org/10.1111/disa.12559>.
- Kusenbach, M. (2003). Street phenomenology. In *www.sagepublications.com* (Vol. 4, Issue 3). www.sagepublications.com.
- Lecoutere, E., & Wuyts, E. (2021). Confronting the Wall of Patriarchy: Does Participatory Intrahousehold Decision Making Empower Women in Agricultural Households? *The Journal of Development Studies*, *57*(6), 882–905. <https://doi.org/10.1080/00220388.2020.1849620>.
- Lei, L. (2023). The Patriarchal Trap: The Village Wives Left Behind Amid Chinese Rural–Urban Migration. *Sage Open*, *13*(1). <https://doi.org/10.1177/21582440221144245>.
- Letourneau, A., Davidson, D., Karsgaard, C., & Ivanova, D. (2024). Proud fathers and fossil fuels: gendered identities and climate obstruction. *Environmental Politics*, *33*(4), 678–698. <https://doi.org/10.1080/09644016.2023.2274271>.
- McKinley, C. E., Lilly, J. M., Knipp, H., & Liddell, J. L. (2021). “A Dad Can Get the Money and the

- Mom Stays at Home”: Patriarchal Gender Role Attitudes, Intimate Partner Violence, Historical Oppression, and Resilience Among Indigenous Peoples. *Sex Roles*, 85(9–10), 499–514. <https://doi.org/10.1007/s11199-021-01232-7>.
- Mezzina, R., Gopikumar, V., Jenkins, J., Saraceno, B., & Sashidharan, S. P. (2022). Social Vulnerability and Mental Health Inequalities in the “Syndemic”: Call for Action. *Frontiers in Psychiatry*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.894370>.
- Miñarro, S., Navarrete Forero, G., Reuter, H., & van Putten, I. E. (2016). The role of patron-client relations on the fishing behaviour of artisanal fishermen in the Spermonde Archipelago (Indonesia). *Marine Policy*, 69, 73–83. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.04.006>.
- Mitu, S. J., Schneider, P., Islam, Md. S., Alam, M., Mozumder, M. M. H., Hossain, M. M., & Shamsuzzaman, Md. M. (2021). Socio-Economic Context and Community Resilience among the People Involved in Fish Drying Practices in the South-East Coast of Bangladesh. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(12), 6242. <https://doi.org/10.3390/ijerph18126242>.
- Mo, C. H. (2018). Perceived Relative Deprivation and Risk: An Aspiration-Based Model of Human Trafficking Vulnerability. *Political Behavior*, 40(1), 247–277. <https://doi.org/10.1007/s11109-017-9401-0>.
- Mosepele, K., & Kolawole, O. D. (2017). Fisheries governance, management and marginalisation in developing countries: Insights from Botswana. *Cogent Food & Agriculture*, 3(1), 1338637. <https://doi.org/10.1080/23311932.2017.1338637>.
- Mozumder, M. M. H., Schneider, P., Islam, M. M., Deb, D., Acharjee, M. R., & Washi, A. M. J. (2024). Bridging the gap: enhancing socio-ecological resilience by breaking the debt cycle among small-scale hilsa fishers in Bangladesh. *Maritime Studies*, 23(1), 10. <https://doi.org/10.1007/s40152-024-00355-3>.
- Mpuure, D. M., & Mengba, J. D. (2024). Natural resource dependence, policy and institutions for environmental sustainability and African welfare. *Sustainable Development*, 32(3), 2176–2193. <https://doi.org/10.1002/sd.2752>.
- Mukaila, R., Ukwuaba, I. C., & Umaru, I. I. (2023). Economic impact of disease on small-scale catfish farms in Nigeria. *Aquaculture*, 575, 739773. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.739773>.
- Mustika, I., Herawati, T., & Muffikhati, I. (2023). Strategi Penghidupan, Manajemen Keuangan, Kerentanan Ekonomi, dan Ketahanan Keluarga Nelayan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 269–279. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.62017>.
- Nance, A. H., Clarke, R. H., & Cook, C. N. (2024). An international perspective on the use of community engagement by conservation practitioners to support the management of inhabited islands. *Conservation Science and Practice*, 6(8). <https://doi.org/10.1111/csp2.13186>.
- Nguyen, M.-H. T., Hodgetts, D., & Chamberlain, K. (2025). Cultural process considerations in a mixed methods investigation of social enterprise performance in Vietnam. *Qualitative Research in Psychology*, 1–25. <https://doi.org/10.1080/14780887.2025.2544677>.
- Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness. *American Journal of Community Psychology*, 41(1–2), 127–150. <https://doi.org/10.1007/s10464-007-9156-6>.
- Pahux, E. (2023). *Peran Agama Dalam Masyarakat Marginal*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/f367u>.
- Pattipeilohy, P. F. V., Thenu, S. F. W., Matitaputty, I. T., & Girsang, W. (2024). Financial Literacy And Inclusion Of Farmers And Fishermen: A Case Study In Tawiri Village And Dusun Seri Ambon City Island, Maluku Indonesia. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(10), 9791–9808. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i10.44778>.
- Pinem, E. Y., Widiono, S. W., & Irnad, I. (2019). Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(2), 91–112. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.2.91-112>.
- Pomeroy, R., Arango, C., Lomboy, C. G., & Box, S. (2020). Financial inclusion to build economic resilience in small-scale fisheries. *Marine Policy*, 118, 103982. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103982>.
- Popov, V. V., Muzika, O. A., & Kholina, O. A. (2023). *Phenomenological Approach to Inclusive Society Construction: Theoretical and Conceptual Aspects* (pp. 29–37). https://doi.org/10.1007/978-3-031-23856-7_4.
- Putiamini, S., Mulyani, M., Patria, M. P., Soesilo, T. E. B., & Karsidi, A. (2022). Social vulnerability of coastal fish farming community to tidal (Rob) flooding: a case study from Indramayu, Indonesia. *Journal of Coastal Conservation*, 26(2), 7. <https://doi.org/10.1007/s11852-022-00854-7>.
- Rahim, A., Rossali, W., Laapo, A., Sabar, W., Syam, U., & Rijal, S. (2021). Factors Affecting Household Income in the Post-Empowerment of Small-Scale Fishermen Wives. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 828(1), 012049. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/828/1/012049>.
- Rashid, M. M., Singh Jamir Singh, P., & Azman, A. (2025).

- Promotion of Human Capital in Traditional Fishing Villages: An Empirical Analysis. *Journal of Emerging Markets and Management*, 1(2), 1–22. <https://doi.org/10.63385/jemm.v1i2.107>.
- Richards, M. (2023). *Posthuman Community Psychology*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003057673>.
- Roberts, N., Mengge, B., Utina, Muh. R., Muhatar, F., Anugerah, Iawardanhi, A., Muhammad Zulkifli, R., & Humphries, A. (2022). Patron-client relationships shape value chains in an Indonesian island-based fisheries system. *Marine Policy*, 143, 105142. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105142>.
- Runciman, W. G. . (1972). *Relative deprivation and social justice: a study of attitudes to social inequality in twentieth-century England, [by] W.G. Runciman*. Penguin.
- Salmi, P., Linke, S., Siegrist, N., & Svets, K. (2022). A new hope for small-scale fisheries through local action groups? Comparing Finnish and Swedish experiences. *Maritime Studies*, 21(3), 309–323. <https://doi.org/10.1007/s40152-022-00269-y>.
- Sanon, V.-P., Ouedraogo, R., Toé, P., El Bilali, H., Lautsch, E., Vogel, S., & Melcher, A. H. (2021). Socio-Economic Perspectives of Transition in Inland Fisheries and Fish Farming in a Least Developed Country. *Sustainability*, 13(5), 2985. <https://doi.org/10.3390/su13052985>.
- Savonen, J., Kataja, K., & Sakki, I. (2022). Distancing from the worst or facing the inescapable? Social representations and positioning of people in marginalised groups. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 32(5), 896–907. <https://doi.org/10.1002/casp.2603>.
- Sgambati, S. (2022). Who owes? Class struggle, inequality and the political economy of leverage in the twenty-first century. *Finance and Society*, 8(1), 1–21. <https://doi.org/10.2218/finsoc.7115>.
- Shirani, F., Henwood, K., & Coltart, C. (2012). Meeting the Challenges of Intensive Parenting Culture: Gender, Risk Management and the Moral Parent. *Sociology*, 46(1), 25–40. <https://doi.org/10.1177/0038038511416169>.
- Sidik, F., & Habibi, M. (2024). A Prize for the Village Ruling Class: “Village Funds” and Class Dynamics in Rural Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 54(3), 387–411. <https://doi.org/10.1080/00472336.2023.2193968>.
- Siisiäinen, M. (2003). *Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam*.
- Slikkerveer, L. J. (2019). *Gotong Royong: An Indigenous Institution of Communitarity and Mutual Assistance in Indonesia* (pp. 307–320). https://doi.org/10.1007/978-3-030-05423-6_14.
- Smith, J. A., & Osborn, M. (2015). Interpretative phenomenological analysis as a useful methodology for research on the lived experience of pain. *British Journal of Pain*, 9(1), 41–42. <https://doi.org/10.1177/2049463714541642>.
- Sofian, A. S. (2023). Struktur Ketergantungan dan Marjinality Pada Komunitas Nelayan Tangkap Tradisional. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 195–206. <https://doi.org/10.57248/jishum.v2i2.318>.
- Stiegler, S. (2021). On Doing Go-Along Interviews: Toward Sensuous Analyses of Everyday Experiences. *Qualitative Inquiry*, 27(3–4), 364–373. <https://doi.org/10.1177/1077800420918891>.
- Sudarmono, S. (2023). SOCIAL STRATIFICATION AMONG THE URBANIZED FISHING COMMUNITIES IN CITY OF MAKASSAR. *Sosiohumaniora*, 25(1), 1. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v25i1.44161>.
- Sumitro, S., Oruh, S., Kamaruddin, S. A., & Agustang, A. (2022). Solidaritas Sosial Komunitas Masyarakat Nelayan Pulau Liukang Loe di Desa Bira. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(3), 490–499. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.46128>.
- Suryawan, N. (2015). *Alih Fungsi Pesisir Pascareklamsi dan Implikasinya terhadap Marginalisasi Nelayan di Pulau Serangan, Denpasar* (Vol. 05).
- Susilo, E., Purwanti, P., Fattah, M., Qurrata, V. A., & Narmaditya, B. S. (2021). Adaptive coping strategies towards seasonal change impacts: Indonesian small-scale fisherman household. *Heliyon*, 7(4), e06919. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06919>.
- Syarif, E., & Malik, A. (2025). The Local Wisdom of Patorani Fishermen: A Sustainable Solution to Poverty and the Sustainable Development Goals (SDGs). *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(5). <https://doi.org/10.35877/soshum4443>.
- Tarigan, M. I., & Ferdinanto, T. (2024). Strong Sustainability and Ocean Justice: Fostering Coastal Community Well-Being in Indonesia. *Arena Hukum*, 17(3), 566–587. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2024.01703.5>.
- Triana, Y. T., & Hidayah, Z. (2020). KAJIAN POTENSI DAERAH RAWAN BANJIR ROB DAN ADAPTASI MASYARAKAT DI WILAYAH PESISIR UTARA SURABAYA. *Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan Dan Perikanan*, 1(1), 141–150. <https://doi.org/10.21107/juvenil.v1i1.6961>.
- Varghese, C., & Kumar, S. S. (2022). Marginality: A Critical Review of the Concept. *Review of Development and Change*, 27(1), 23–41. <https://doi.org/10.1177/09722661221096681>.
- Wang, X., Zheng, J., Yang, Y., & Chen, T. (2025). Resilience and intentions of fishermen transitioning to ecological farming: insights from China’s Yangtze River basin. *Frontiers in Environmental Economics*, 4. <https://doi.org/10.3389/frevc.2025.1518032>.
- Wei, C., Xu, H., & Wall, G. (2024). Asset assemblages and livelihood resilience in a coastal community. *Journal of Sustainable Tourism*, 32(5), 904–922.

<https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2186826>.

- Wu, M., Yan, Y., & Kong, D. (2024). The Impact of Social Environment Perception on Relative Deprivation among Residents in Rural Tourism Destinations. *Sustainability (Switzerland)*, *16*(20). <https://doi.org/10.3390/su16208937>.
- Wu, X., & Yuan, Z. (2023). Understanding the socio-cultural resilience of rural areas through the intergenerational relationship in transitional China: Case studies from Guangdong. *Journal of Rural Studies*, *97*, 303–313. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.12.001>.
- Wulandari, N., Tri Indrianti, D., Hilmi, M. I., Luar, P., Fkip, S., & Jember, U. (2022). ANALISIS GENDER PERAN PEREMPUAN PESISIR PADA KETAHANAN KELUARGA DI DESA PUGER KULON KABUPATEN JEMBER. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, *7*(1). <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1>.
- Wuwungan, J. J., Hero Soepeno, M., & Devens Rompas, D. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN INDONESIA DI DAERAH PERBATASAN DARI GANGGUAN KAPAL PENCURI IKAN NEGARA ASING 1*. Retrieved.
- Xie, Y., Ke, S., & Li, X. (2023). Psychological Resilience and Farmers' Homestead Withdrawal: Evidence from Traditional Agricultural Regions in China. *Agriculture*, *13*(5), 1044. <https://doi.org/10.3390/agriculture13051044>.
- Yuniarti, D., & Sukarniati, L. (2021). STRATEGY COPING DAN PENDAPATAN NELAYAN: SEBUAH KAJIAN EMPIRIK. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *16*(1), 1. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v16i1.8742>.
- Yunus, M., Azwar, W., & Jamil, M. (2024). Marginal Membawa Masyarakat Maurek Bawang. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12593161>.
- Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. *American Journal of Community Psychology*, *23*(5), 581–599. <https://doi.org/10.1007/BF02506983>.